



## Sahkan 16 Perda Selama 2020

**KETUA** DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi, mengatakan selama tahun 2020, DPRD Ketapang telah mengesahkan 16 Peraturan Daerah (Perda). Jumlah tersebut melebihi rencana pembahasan dan pengesahan Perda yang telah direncanakan dalam program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tahun 2019.



M. Febriadi

Febri, sapaan karibnya, menjelaskan, pihaknya telah mengesahkan 16 Perda selama tahun 2020. Dari 16 perda tersebut, dua di antaranya adalah Perda APBD Perubahan Tahun 2020 dan Perda APBD Tahun 2021. "Sedangkan 14 perda lainnya adalah perda usulan dari eksekutif dan dua perda inisiatif. 10 perda disahkan dua bulan lalu dan empat perda disahkan di Bulan Desember ini," katanya, kemarin (29/12).

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Febri mengaku tidak tahu apakah lebih banyak Perda yang disahkan di tahun 2020 atau di tahun 2019, karena dia baru menjabat sebagai ketua DPRD Ketapang pada Oktober 2019. Namun demikian, dengan disahkannya 16 Perda tersebut diharapkan dia bisa bermanfaat untuk Ketapang.

Dia mengungkapkan, DPRD selalu membuat rencana kerja setiap tahunnya. Rencana tersebut, menurutnya, tertuang dalam rencana program Propemperda. "Yang sedikit alot kemarin itu adalah pembahasan Perda APBD, baik APBD murni maupun APBD perubahan. Tapi itu sebuah dinamika. Semuanya pasti ada jalan terbaiknya," ungkapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya di tahun 2020 Propemperda merencanakan 10 Raperda yang akan dibahas. Tapi, dia menambahkan, karena ada empat Perda yang memang mendesak untuk dibahas dan disahkan, sehingga dimasukkan dalam Propemperda tahun 2020. "Itu dimasukkan karena mendesak, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat. Makanya kita masukkan dalam Propemperda," paparnya.

Sementara terkait seminar anti korupsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Ketapang, menurut Febri dilakukan karena tidak bisa bimtek ke luar daerah, sehingga mengambil kebijakan untuk mengadakan seminar pencegahan korupsi. "Ini penting karena kita tidak mau terjebak pada proses-proses sebelumnya. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk mengantisipasi tindakan korupsi, termasuk di lembaga DPRD ini," pungkasnya. (afi)





## Sahkan 16 Perda Selama 2020

**KETUA** DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi, mengatakan selama tahun 2020, DPRD Ketapang telah mengesahkan 16 Peraturan Daerah (Perda). Jumlah tersebut melebihi rencana pembahasan dan pengesahan Perda yang telah direncanakan dalam program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tahun 2019.



M. Febriadi

Febri, sapaan karibnya, menjelaskan, pihaknya telah mengesahkan 16 Perda selama tahun 2020. Dari 16 perda tersebut, dua di antaranya adalah Perda APBD Perubahan Tahun 2020 dan Perda APBD Tahun 2021. "Sedangkan 14 perda lainnya adalah perda usulan dari eksekutif dan dua perda inisiatif. 10 perda disahkan dua bulan lalu dan empat perda disahkan di Bulan Desember ini," katanya, kemarin (29/12).

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Febri mengaku tidak tahu apakah lebih banyak Perda yang disahkan di tahun 2020 atau di tahun 2019, karena dia baru menjabat sebagai ketua DPRD Ketapang pada Oktober 2019. Namun demikian, dengan disahkannya 16 Perda tersebut diharapkan dia bisa bermanfaat untuk Ketapang.

Dia mengungkapkan, DPRD selalu membuat rencana kerja setiap tahunnya. Rencana tersebut, menurutnya, tertuang dalam rencana program Propemperda. "Yang sedikit alot kemarin itu adalah pembahasan Perda APBD, baik APBD murni maupun APBD perubahan. Tapi itu sebuah dinamika. Semuanya pasti ada jalan terbaiknya," ungkapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya di tahun 2020 Propemperda merencanakan 10 Raperda yang akan dibahas. Tapi, dia menambahkan, karena ada empat Perda yang memang mendesak untuk dibahas dan disahkan, sehingga dimasukkan dalam Propemperda tahun 2020. "Itu dimasukkan karena mendesak, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat. Makanya kita masukkan dalam Propemperda," paparnya.

Sementara terkait seminar anti korupsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Ketapang, menurut Febri dilakukan karena tidak bisa bimtek ke luar daerah, sehingga mengambil kebijakan untuk mengadakan seminar pencegahan korupsi. "Ini penting karena kita tidak mau terjebak pada proses-proses sebelumnya. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk mengantisipasi tindakan korupsi, termasuk di lembaga DPRD ini," pungkasnya. (afi)